

BAB I

PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan yang dijalani melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan tujuan akhir dari adanya pembangunan. Tujuan dan cita-cita ini dapat diwujudkan melalui perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yang memuat langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis yang memperhatikan potensi sumberdaya dan tantangan yang sedang dihadapi. Pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada struktur sosial masyarakat dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah di samping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi (Jumiati, 2014).

Pembangunan ekonomi adalah aspek terpenting dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pembangunan nasional. Adanya perubahan lapangan industri dan perdagangan adalah salah satu sebab adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah atau wilayah, sedangkan pendapatan nasional yakni nilai

produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam satu tahun (Luki Diktio, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari sebuah proses pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap sektor-sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan (De FRETES, 2017). Pertumbuhan ekonomi sudah terlanjur diyakini sebagai tolok ukur untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengankerangka pemikiran kemungkinan produksi sebagai dasar untuk memahami tingkatan, komposisi, dan pertumbuhan output nasional(Hajeri et al., 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan merupakan kondisi utama dan mungkin bisa dikatakan sebagai suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2001 : 37).kuznest mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kapasitas dalam jangka panjang suatu Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000 : 136). Pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian suatu daerah(tenggara, 2016).

Setelah era orde baru muncul kebijakan baru pada era reformasi yakni diatur di dalam undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kebijakan ini mengatur tentang hak dan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing. Kebijakan ini biasa disebut dengan otonomi daerah atau desentralisasi, ini bisa dikatakan sebagai pedoman untuk bertata negara yang baik. Dengan adanya desentralisasi pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan lebih leluasa karena pemerintah daerah pasti lebih mengenal daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat (Mahmud, 2015). Dengan demikian, pembangunan ekonomi di daerah bisa dirasakan masyarakat.

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi-potensi dari berbagai sektor perekonomian daerahnya. Daerah harus memiliki keunggulan tertentu pada sektor yang berbeda dengan daerah lain, sehingga daerah perlu melakukan antisipasi dengan menentukan sektor apa yang menjadi sektor basis ekonomi dan kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan datang (Suyatno, 2000 : 145). Kondisi ekonomi daerah yang berbeda-beda terutama karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta kondisi sarana dan prasarana belum memadai di daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda. Dengan berbagai macam usaha serta peran masing-masing sektor di daerah tanpa mengetahui

sektor unggulan untuk dikembangkan, kenyataan terjadi jika sektor-sektor ekonomi yang unggulan ini dikembangkan dan menjadi keunggulan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah (Takalumpang et al., 2018).

Struktur ekonomimerupakan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi suatu negara dicerminkan oleh kontribusi sektoral didalam pendapatan nasional (Arsyad, 2010 : 12-17). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud struktur ekonomi adalah susunan sektor-sektor ekonomi guna melihat sektor yang unggul maupun sektor nun unggul dalam suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah-daerah maju menunjukkan pentingnya pengaruh tingkat perkembangan struktural yang tinggi di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Komponen utama dari proses perubahan struktural tersebut yakni mencakup pergeseran bertahap dari aktivitas sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda (Todaro, 2000 : 59). Secara umum transformasi yang terjadi di daerah sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern dapat diartikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus

menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita.

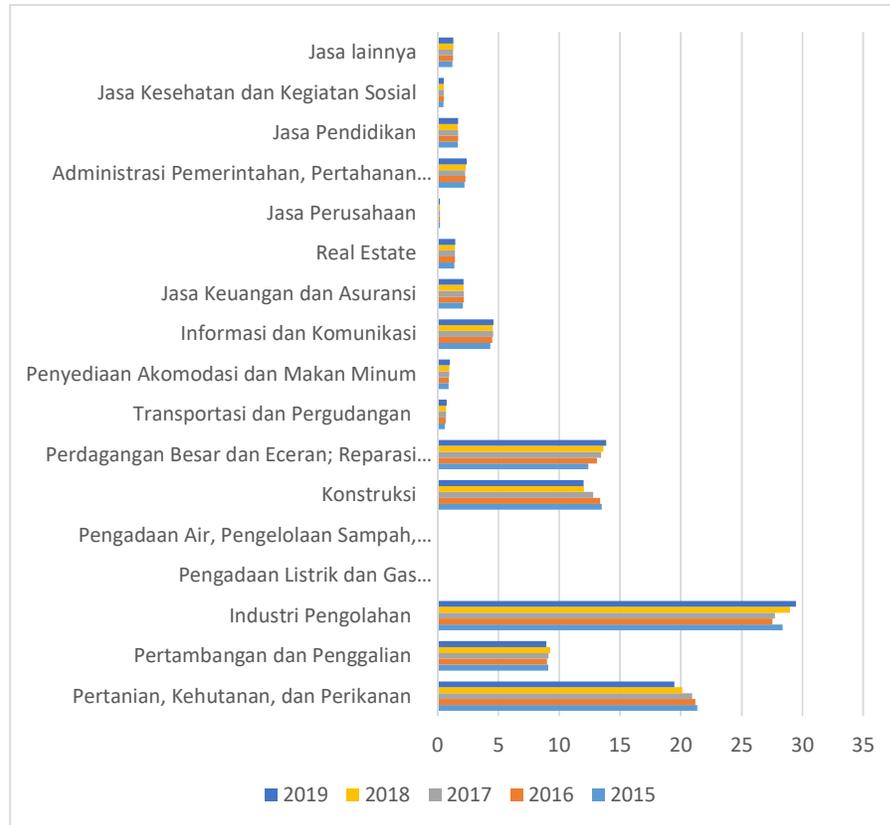
Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis, Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35' BT dan 6°40'-7°18' LS. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km, membentang dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah Barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km². Secara administrasi, Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 328 Desa/Kelurahan. Kabupaten Tuban merupakan daerah yang tergolong memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dengan topografi dan struktur tanah yang beraneka ragam (Anonim, 2019). Jika pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijak, efisien dan efektif akan berdampak pada optimalnya kontribusi sumberdaya alam bagi perekonomian masyarakat dan dunia usaha serta bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa potensi unggulan yang memungkinkan untuk dikembangkan yakni potensi pertambangan, potensi pertanian, potensi perikanan dan kelautan, potensi industri pengolahan, dan potensi pariwisata. Banyaknya potensi yang dapat dikembangkan di kabupaten dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, karena letaknya yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta, dan memiliki akses ke perairan Laut Jawa, sehingga memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah (Anonim, 2019). Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat

menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban. Pada gilirannya mampu menjadi pendorong peningkatan perekonomian masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pengembangan potensi tersebut masih belum terasa maksimal dilihat dari pergerakan ekonomi yang sangat lambat serta minimnya lowongan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat asli dari kabupaten Tuban yang melakukan transmigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu indikator utamanya adalah dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan dilingkup wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau oleh penduduk daerah tersebut (Anonim, 2008). Produk domestik regional bruto terbagi menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mengartikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor (lapangan usaha) berdasarkan harga-harga selama tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengartikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor (lapangan usaha) berdasarkan harga pada tahun dasar.

Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tuban 2015 – 2019 (persen)



Sumber : (Anonim, 2020)

Potensi perekonomian di kabupaten tuban selama kurun waktu 2015 -2019 yang paling menonjol yaitu pada sektor industri pengolahan dimana setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini terjadi karena memang di kabupaten tuban terdapat beberapa industri besar seperti PT. Semen Gresik Tbk, PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT. TPPI), PT. Holcim Indonesia, PT. Gasuma Federal Indonesia, PT. Inti Kalsium Indonesia(Anonim, 2019). Sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan juga memberikan kontribusi tinggi pada PDRB di kabupaten tuban setelah industri pengolahan. Setiap tahun sektor ini juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Kabupaten Tuban)**”.

4.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada perubahan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa timur ?
2. Apakah ada perubahan sektor yang sama di Jawa timur ?
3. Apakah ada perubahan sektor yang relatif lebih cepat dibanding sektor lain di kabupaten Tuban ?
4. Apakah ada perubahan sektor basis di Kabupaten Tuban ?
5. Apakah ada perubahan tipe daerah di Kabupaten Tuban ?

4.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah ada perubahan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa timur
2. Untuk menganalisis apakah ada perubahan sektor yang sama di Jawa timur
3. Untuk menganalisis apa ada perubahan sektor yang relatif lebih cepat dibanding sektor yang sama di kabupaten Tuban
4. Untuk menganalisis apakah ada perubahan sektor basis di Kabupaten Tuban
5. Untuk menganalisis apa ada perubahan tipe daerah

4.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sesuai dengan tujuan yang telah

disampaikan. Hal itu dilakukan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Penelitian berfokus pada sektor potensial di kabupaten Tuban dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 tahun 2015 – 2019 Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur.

4.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan Kebijakan tentang Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Tuban

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan pusat dilingkungan kampus UPN Veteran Jawa Timur.